



**PENGEMBANGAN PROGRAM SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KABUPATEN ENREKANG MELALUI MODEL KEMITRAAN**

Muh. Ibrahim¹*Saidang²*Suparman³*Putriyani.S⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Enrekang

*Corresponding Author.E-mail: suparmanpps25@gmail.com

Receive: 10/09/2020

Accepted: 10/10/2020

Published: 29/10/2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Menggambarkan perencanaan program kemitraan yang dilaksanakan oleh UPT SKB Kabupaten Enrekang , 2) Menggambarkan implementasi model kemitraan yang dilaksanakan oleh UPT SKB Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah Kepala UPT SKB Kabupaten Enrekang, pamong UPT SKB Kabupaten Enrekang, staff Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang, serta pengelola PKBM Sembada. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Peneliti merupakan instrument utama penelitian dengan dibantu pedoman wawancara. Teknik analisis data yang dilakukan adalah display data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi yang dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan 1). Perencanaan program kemitraan UPT SKB Kabupaten Enrekang 1 dilatarbelakangi kebutuhan dana, fasilitas dan SDM, untuk mengotimalkan program, adanya komitmen dari lembaga untuk menjaga mutu program, serta menyalurkan lulusan program kecakapan hidup. Partisipasi Perencanaan program UPT SKB Kabupaten Enrekang melibatkan pihak dari dalam lembaga dan luar lembaga, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang sebagai pembuat kebijakan.

Kata Kunci : *Pengembangan Program, Sanggar Kegiatan Belajar, Kemitraan*

A. Pendahuluan

Pendidikan diharapkan dapat semakin berkembang dengan semakin baiknyakualitasdankuantitaspendidikansehing gasemualapisanmasyarakat dapatmemperolehpendidikanyangbermutu. Dengan semakin berkembangnya dunia pendidikan diskriminasi juga akan berkurang. Namun sayangnya akses pendidikan belum seluruhnya diterima masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah terpencil terutama di daerah-daerah tertinggal. Banyak dari masyarakat di daerah terpencil belum mendapatkan akses pendidikan sehingga berdampak pada kebodohan yang akhirnya kembali menyebabkan kemiskinan. Belum terjangkaunya pendidikan oleh masyarakat miskin mengakibatkanbanyaknyaanak-anaktidaksekolah, dantingginyakususputus sekolah yang akhirnya menimbulkan masalah baru. Meskipun saat ini pemerintah sudah menggalakkan wajib belajar 9 tahun, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang miskin belum tersentuh pendidikan.

Pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan di luar jalur formal yang dilaksanakan sebagai salah satu implementasi dari pendidikan sepanjang hayat. Dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah telah menjamin pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia seperti yang tertulis dalam pasal 31 ayat 1 yaitu "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Berbeda dengan pendidikan formal yang terbatas pada umur, pendidikan non formal tidak terbatas pada umur, artinya siapapun dapat mendapatkan pembelajaran. Pendidikan non formal dapat ditempuh dari mulai 0 tahun sampai lansia sehingga pendidikan non formal memperluas kesempatan bagi orang-orang yang tidak terjangkau pendidikan formal. Secara garis besar Pendidikan non formal dibagi menjadi tujuh ranah yakni meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan

keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan.

Salah satu lembaga pemerintah yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan non formal saat ini adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Sebelumnya SK Mendikbud RI Nomor 023/O/1997 menyebutkan bahwa "Tugas pokok SKB: melaksanakan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga berdasarkan kebijakan teknis Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga." Dari SK tersebut dapat diartikan bahwa sebelumnya tugas pokok SKB melaksanakan program-program percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan non formal, tetapi setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, maka peran dan fungsi SKB berubah sesuai dengan karakteristik dan kebijakan pemerintah Kabupaten/kota masing-masing. Sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan non formal, SKB diharapkan mampu mengakses banyak program pendidikan non formal, SKB memiliki tanggung jawab menyelenggarakan program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi keterbatasan yang dimiliki SKB menyebabkan lembaga tidak dapat sepenuhnya melaksanakan tugas maupun fungsinya.

Otonomi daerah mempengaruhi peran SKB dalam penyelenggaraan pendidikan non formal. Banyak permasalahan yang muncul melemahkan peran dan fungsi SKB sebagai penyelenggara pendidikan non formal. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain : kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran operasional bagi SKB, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, rendahnya partisipasi dan kemitraan masyarakat.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan

Informal Prof. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog “Selama ini hubungan PKBM dengan SKB seperti air dengan minyak. Sejak diberlakukan otonomi daerah, PKBM maju pesat, sementara banyak SKB kehilangan perannya” (Dina, 2012). Pernyataan di atas dapat menggambarkan SKB dan PKBM selamainibelumberjalandengansinergisdanmenjalinkemitraandenganbaik dalam penyelenggaraan pendidikan non formal. Faktalain adalah banyak SKB yang tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan optimal salah satunya SKB di Kalimantan Tengah, karena tidak ada dukungan dari pemerintah daerah setempat dan hanya mengandalkan dukungan dari APBN yang tidak mencukupi kebutuhan dana di lapangan (Anonim, 2010).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 mengenai penyelenggaraan pendidikan non formal diatur dalam Bab IV pasal 100 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan satuan pendidikan non formal meliputi satuan pendidikan: lembaga kursus dan lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim dan pendidikan anak usia dini jalur non formal.” (Fauzi, 2012.). Dalam peraturan tersebut pemerintah tidak menyebutkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai salah satu penyelenggara pendidikan non formal. Dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan non formal hanya dilaksanakan oleh masyarakat bukan oleh lembaga pemerintah, sehingga pemerintah hanya terfokus pada pemberian bantuan kepada satuan atau lembaga masyarakat bukan lagi kepada lembaga pemerintah. Itulah sebabnya banyak PKBM maju pesat dan SKB banyak yang kehilangan perannya seperti yang telah diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.

Banyak permasalahan yang sebenarnya dialami oleh SKB seperti keterbatasan dalam hal pendanaan dan

fasilitas. Keterbatasan dana, dan fasilitas menyebabkan peran lembaga mitra sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan program di SKB. Lembaga mitra baik pemerintah maupun swasta memiliki peran penting dalam penyelenggaraan dan menentukan keberhasilan program yang dilaksanakan oleh SKB. Dengan menjalin kemitraan dengan lembaga lain, SKB diharapkan dapat mengatasi kelemahan dan tantangan yang terjadi dalam penyelenggaraan programnya. Meskipun lembaga mitra mempunyai peran sangat penting, tetapi masih banyak SKB belum optimal melaksanakan kemitraan dengan lembaga lain dan hanya mengandalkan bantuan pemerintah pusat yang jumlahnya sangat terbatas dan belum dapat mengatasi permasalahan yang ada.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Enrekang merupakan lembaga pendidikan non-formal di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang. SKB Kabupaten Enrekang menyelenggarakan program seperti program kecakapan hidup, program peningkatan mutu tenaga kependidikan, PAUD, program pengembangan data dan informasi pendidikan non formal, dan pengembangan kurikulum. UPT SKB Kabupaten Enrekang membutuhkan dana, fasilitas, SDM yang mendukung agar dapat menyelenggarakan program-program tersebut, namun jumlah sumber daya yang dimiliki sangat terbatas.

Dana, fasilitas yang terbatas, faktor geografis dan SDM terbatas, tidak memungkinkan untuk mengembangkan program-program UPT SKB Kabupaten Enrekang secara mandiri, maka dalam menyelenggarakan program-program, UPT SKB Kabupaten Enrekang menjalin kemitraan dengan lembaga lain baik lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kerjasama ini dilakukan agar program-program yang dilaksanakan lebih optimal dan dapat mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian di atas maka penulis berencana untuk mengetahui Pengembangan Program Sanggar

Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Enrekang melalui Model Kemitraan.

B. Metode

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sifat data yang dikumpulkan adalah berupa data kualitatif karena peneliti bermaksud mendeskripsikan dan menggambarkan Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Enrekang melalui Model kemitraan, Penelitian ini dilaksanakan di SKB Kabupaten Enrekang yang bertempat di Jl. Gunung Bambapuang No.46 Enrekang, Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala UPT SKB Kabupaten Enrekang, Pamong UPT SKB Kabupaten Enrekang, Staff bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang dan Pengelola PKBM Sembada, lembaga mitra UPT SKB Kabupaten Enrekang, Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara, Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari para pihak yang terlibat dalam kemitraan dengan SKB Kabupaten Enrekang. Peneliti sebagai pewawancara akan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang diwawancarai. Analisis data dilakukan dalam proses pengamatan dan wawancara deskriptif, selanjutnya dilakukan analisis yang merinci data yang diperoleh lebih lanjut kemudian mengorganisasikannya. Analisis ini dilakukan bersama dengan pengamatan terfokus dan wawancara terkait dengan fokus penelitian yaitu Pengembangan Program Sanggar Kegiatan Belajar Melalui Model Kemitraan. Tahap berikutnya dilakukan analisis dengan cara pengorganisasian hasil temuan data wawancara yang diperoleh. Tahap selanjutnya dilakukan dengan analisis tema untuk mendeskripsikan secara menyeluruh dan menampilkan makna yang menjadi fokus penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang kemitraan yang dilaksanakan UPT SKB Kabupaten Enrekang

dengan lembaga lain. Alasan tersebut antara lain :

- 1) Kebutuhan dana, fasilitas maupun SDM berupa narasumber teknis atau tutor untuk mengoptimalkan program yang dilaksanakan.
- 2) UPT SKB Kabupaten Enrekang berusaha menjaga mutu program yang diselenggarakan khususnya mutu output program.
- 3) Menyalurkan lulusan program kecakapan hidup ke berbagai tempat sesuai bidang yang dibutuhkan.

Program UPT SKB Kabupaten Enrekang membutuhkan sumber daya seperti dana, fasilitas dan SDM agar program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan optimal. Dengan keterbatasan dana, fasilitas dan SDM yang dimiliki, tidak memungkinkan bagi UPT SKB Kabupaten Enrekang merencanakan programnya secara mandiri, oleh karena itu UPT SKB Kabupaten Enrekang membutuhkan lembaga atau pihak lain, agar kebutuhan dana, fasilitas dan SDM dapat terpenuhi dan program dapat dilaksanakan dengan optimal.

UPT SKB Kabupaten Enrekang menjalin kerjasama atau kemitraan dengan lembaga lain pada kegiatan perencanaan program, dalam rangka memenuhi kebutuhan dana, fasilitas dan SDM agar dapat melaksanakan program dengan optimal. Selain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya, kemitraan juga dibutuhkan untuk menjaga mutu program serta untuk menyalurkan lulusan program. Kemitraan merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas suatu bidang tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Ambar Teguh, 2004:129)

Perencanaan program kemitraan UPT Kabupaten Enrekang melibatkan pihak dari UPT SKB Kabupaten Enrekang sendiri yang terdiri dari Kepala UPT SKB Kabupaten Enrekang, pamong dan Tata Usaha, serta dari

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang sebagai pembuat kebijakan untuk menentukan prioritas program yang akan dilaksanakan.

Teori perencanaan pendidikan non formal menyebutkan bahwa perencanaan melibatkan orang-orang ke dalam suatu proses untuk menentukan dan menemukan masa depan yang diinginkan (Sudjana, 2004: 59). Dari hasil penelitian, perencanaan program UPT SKB Kabupaten Enrekang melibatkan pihak dari UPT SKB Kabupaten Enrekang maupun dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang. Penentuan prioritas program dilakukan berdasarkan keputusan bersama antara pihak UPT SKB Kabupaten Enrekang dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang.

Perencanaan program UPT SKB Kabupaten Enrekang melibatkan partisipasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang ditunjukkan berupa keterlibatan dengan memberikan ide atau masukan program, maupun dapat dilakukan dalam bentuk nyata yaitu berupa dana, maupun fasilitas. Partisipasi merupakan peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam kegiatan dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu ke arah modal dan materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46). Partisipasi Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam perencanaan program UPT SKB Kabupaten Enrekang dilakukan secara langsung dengan memberikan masukan, ide, maupun dalam bentuk dana dan fasilitas. Partisipasi secara langsung merupakan keikutsertaan seseorang secara langsung dalam proses partisipasi, misalnya dalam kegiatan pertemuan, diskusi, untuk mengajukan ide, pandangan atau pendapat (Euis Sunarti, 2012).

UPT SKB Kabupaten Enrekang merencanakan empat program yang rutin setiap

tahun yaitu Pengembangan Data, Informasi Pendidikan Non Formal, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar, Pembelajaran Tenaga Pendidik Non Formal. Perencanaan program dilakukan bersama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang tersedia.

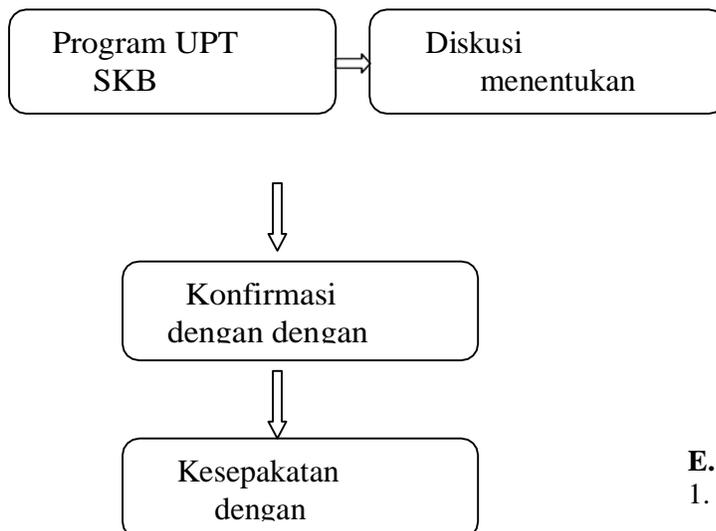
Perencanaan didefinisikan sebagai proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan pada waktu yang akan datang (Sudjana, 2004: 57). Perencanaan program kemitraan UPT SKB Kabupaten Enrekang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan lembaga untuk menyusun prioritas program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyusunan prioritas program dilakukan bersama antara UPT SKB Kabupaten Enrekang dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai pembuat kebijakan, berdasarkan kebutuhan masyarakat.

UPT SKB Kabupaten Enrekang merencanakan program yang dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Program kecakapan hidup atau kursus direncanakan oleh UPT SKB Kabupaten Enrekang berdasarkan hasil identifikasi yang melihat sebagian besar masyarakat yang memiliki perekonomian menengah ke bawah sehingga membutuhkan keterampilan yang bisa digunakan untuk bekerja atau usaha. Selain itu minat masyarakat mengikuti kursus masih cukup banyak. Sedangkan program diklat pembelajaran pendidik non formal perlu untuk direncanakan dan dilaksanakan agar para tutor memiliki kompetensi yang lebih baik untuk dapat melakukan pembelajaran. "Perencanaan berhubungan dengan penentuan prioritas yang ditetapkan berdasarkan relevansi dengan kebutuhan, sumber-sumber yang tersedia tujuan yang akan dicapai dan hambatan yang mungkin dihadapi".

UPT SKB Kabupaten Enrekang yang sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat

Kabupaten Enrekang, memiliki mekanisme kemitraan yang sederhana yang dilakukan tanpa prosedur secara khusus dan tidak menyulitkan bagi UPT SKB Kabupaten Enrekang maupun bagi lembaga mitra. Dapat dijelaskan secara sederhana mekanisme kemitraan UPT SKB Kabupaten Enrekang dengan lembaga mitra, sebagai berikut :

1. Para pamong melakukan diskusi tentang calon lembaga yang akan diajak bermitra sesuai dengan program yang akan dilaksanakan. Calon mitra umumnya merupakan usulan dari pamong UPT SKB Kabupaten Enrekang yang telah mengetahui kualitas lembaga mitra ataupun mengenal secara personal pengelola calon lembaga mitra. Tujuan memilih calon mitra yang sudah dikenal adalah untuk memudahkan dalam melakukan proses kemitraan.
2. Setelah memutuskan calon lembaga yang akan diajak bermitra pihak UPT SKB Kabupaten Enrekang menghubungi atau mendatangi langsung calon lembaga mitra untuk kemudian menyampaikan maksud dari kemitraan tersebut.
3. Jika calon mitra setuju untuk bekerjasama maka UPT SKB Kabupaten Enrekang dan lembaga mitra mengadakan pembicaraan lebih lanjut hal teknis mengenai kemitraan yang akan dilakukan.



Gambar 1. Mekanisme Kemitraan UPT SKB Kabupaten Enrekang

D. Kesimpulan

- a. Perencanaan program kemitraan UPT SKB Kabupaten Enrekang dilatarbelakangi kebutuhan dana, fasilitas, dan SDM untuk mengoptimalkan program yang dilaksanakan, kebutuhan lembaga untuk menjaga mutu program, serta menyalurkan lulusan program kecakapan hidup.
- b. Perencanaan program UPT SKB Kabupaten Enrekang melibatkan partisipasi dari dalam lembaga, yaitu pihak UPT SKB Kabupaten Enrekang dan luar lembaga, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang sebagai pembuat kebijakan.
- c. Perencanaan program kemitraan UPT SKB Kabupaten Enrekang diawali dengan kegiatan identifikasi oleh para pamong, mendengarkan masukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang sebagai pembuat kebijakan dan penentuan prioritas program melalui rapat koordinasi antara UPT SKB Kabupaten Enrekang dan pembuat kebijakan.
- d. Faktor pendukung kemitraan UPT SKB Kabupaten Enrekang antara lain 1). Faktor sumber daya baik dana, fasilitas, dan SDM dari lembaga mitra yang mendukung program UPT SKB Kabupaten Enrekang. 2) jaringan atau *link* yang dimiliki oleh UPT SKB Kabupaten Enrekang baik lembaga pemerintah maupun swasta yang melingkupi tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. Faktor yang menghambat kemitraan, yaitu satu program yang dilaksanakan UPT SKB Kabupaten Enrekang hanya dapat dibiayai satu lembaga pemerintah.

E. Daftar Pustaka

1. Ardianto, N. I., Bidang, P., & Pendidikan, T. (n.d.). *BELAJAR PADA PROGRAM*

- PENDIDIKAN. 147–162.
2. Ambar Teguh Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
 3. Arnady, M. A., & Prasetyo, I. (2016). Evaluasi program kecakapan hidup di sanggar kegiatan belajar Bantul, Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 60. <https://doi.org/10.21831/jppm.v3i1.6303>
 4. Didin Kurniadin & Imam Machali. (2013). *Manajemen Pendidikan Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*.Jogjakarta : Ar-ruzz Media.
 5. Endang Soenarya. (2000). *Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem*.Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.
 6. Hapsari, M. I. (2008). Pengembangan Dan Peningkatan Kinerja Pamong Belajar Sanggar Kegiatan Belajar. *Jiv*, 3(2), 177–183. <https://doi.org/10.21009/jiv.0302.8>
 7. I Nyoman Sumaryadi. (2010). *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*.Bogor: Ghalia Indonesia.
 8. Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif rev.ed*.Bandung: Remaja Rosdakarya
 9. Kaniati, R. (2010). Manajemen Pembinaan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Dalam Peningkatan Kompetensi Profesional Pamong Belajar. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang*, 17(1), 41–47.
 10. Nengsih, Y. K., Sari, A., & Helmi, H. (2018). Pengelolaan pembelajaran program paket C pada pusat kegiatan belajar masyarakat dan sanggar kegiatan belajar di Kota Palembang. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(1), 51–60. <https://doi.org/10.21831/jppm.v5i1.16936>
 11. Tri Suminar dan Mu, A. (2016). Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pendidikan Nonformal Di Jawa Tengah. *Journal of Nonformal Education*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/jne.v2i1.5310>
 12. Tyas, D. K. (2007). Rencana Pengembangan Literasi di Taman Bacaan Masyarakat Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. *Pbsi Upy*, 43, 18–23.